

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada tahun 2013-2015. Berdasarkan *World Economic Database*, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,6 % (2013), 5,0 % (2014) dan 4,76 % (2015). Selain itu, kondisi di perparah dengan rendahnya proses kemudahan berusaha di Indonesia menurut *Ease of Doing Business 2016*. Indonesia menempatkan pada peringkat 109 dari 189 negara ini berarti Indonesia masih jauh tertinggal dari peringkat negara-negara Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada kondisi seperti ini berarti strategi pertumbuhan Indonesia tidak biasa hanya mengandalkan intervensi kebijakan fiskal dan moneter. Pada studi evaluasi atas pelaksanaan paket kebijakan investasi, KPPOD melakukan analisis atas kondisi kemudahan berusaha di daerah. Hasilnya ada tiga indikator dalam menciptakan kemudahan berusaha yaitu memulai usaha, mendapatkan izin-izin mendirikan bangunan, mendaftarkan hak atas tanah dan bangunan. Dari studi ini terlihat target nasional belum mampu dicapai daerah dari segi jumlah prosedur, waktu dan biaya. Kemudahan berusaha di daerah masih menemui hambatan berusaha seperti penambahan prosedur, inisiatif daerah yang tepat, dan keterlibatan instansi lain pada proses perizinan. Dalam pelayanan masyarakat dipersulit dalam penyelesaian yang harusnya selesai dengan cepat dan mudah sehingga masyarakat memerlukan energi, waktu dan biaya. Meskipun pemerintah

menentukan pengurusan izin usaha biar cepat dan mudah tetapi dalam praktek lapangan sungguh berbeda.

Otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001 memberi harapan baru bagi masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang investasi perbaikan dilakukan dengan meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah tidak hanya tergantung pada keunggulan daerah tetapi juga dapat diciptakan melalui tata kelola aspek yang berada dibawah kewenangan pemerintah daerah. Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2016, menyoroti 10 variabel yang diyakini menjadi bagian penting dalam tata kelola. Penciptaan tata kelola yang baik akan berujung pada iklim investasi yang kondusif dan berdampak pada bergeraknya ekonomi. Masuknya investasi juga akan menciptakan perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Perspektif pelaku usaha dalam melihat TKED pada 2016 menunjukkan perbedaan dibanding dua edisi studi terdahulu (TKED 2007 dan TKED 2011). Pada studi TKED 2007 dan TKED 2011, permasalahan utama yang dirasakan pelaku usaha adalah kualitas infrastruktur daerah. Sementara saat ini, pelaku usaha lebih menilai perizinan usaha sebagai aspek yang sangat membebani.

Hasil studi TKED 2016, kenyataan menunjukkan waktu pengurusan kedua jenis izin itu masih jauh dari ketentuan, rata-rata mencapai 14 hari. Keberadaan perizinan usaha sebagai penjamin legalitas tidak hanya semata-

mata memberi keuntungan lebih kepada pelaku usaha. Dari hasil survei *Doing Business* beberapa negara melakukan reformasi mulai memetik hasil yang menjanjikan seperti di Meksiko yang ditunjukkan dengan meningkatnya formalitas usaha. Beberapa fakta tersebut menunjukkan masih bermasalah terhadap proses pelayanan perizinan. Kinerja pelayanan perizinan masih membebani pelaku usaha dari segi waktu dan biaya, ini menggambarkan perbaikan layanan masih harus dilakukan. Perbaikan pelayanan perizinan juga dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membantu pelaku usaha setidaknya untuk mengakses layanan perizinan. Begitu juga dengan transparansi informasi seperti persyaratan, prosedur, biaya dan lama waktu mengurus perizinan. Meski sudah ada beberapa daerah yang menerapkan layanan berbasis *online*, namun masih banyak daerah yang menerapkan sistem manual.

Studi KPPOD secara khusus melihat tata kelola pemerintah daerah dalam 10 indikator yaitu, perizinan usaha, biaya transaksi, kualitas infrastruktur, program pengembangan usaha swasta, interaksi pemda dengan pelaku usaha, keamanan dan resolusi konflik, kapasitas dan integrasi kepala daerah, akses dan kepastian hukum atas lahan, kualitas peraturan daerah, serta tata kelola ketenaga kerjaan. Dari studi TKED 2016, ditemukan belum adanya keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku usaha, terutama kelompok mikro dan kecil. Berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya tambahan, menjadikan sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk

mengurus perizinan. Ketiadaan izin berusaha, juga menempatkan para pelaku usaha kecil dan mikro berada di luar sektor formal.

Selain itu masalah birokrasi, pungutan liar dan ketidakpastian hukum juga mengurangi daerah. Dalam penelitian Smeru berkesimpulan bahwa salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Di dalamnya termuat kebijakan dan pelayanan agar dunia usaha dapat berkembang kearah yang lebih kondusif, dengan terciptanya kondisi yang kondusif maka dapat diharapkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian. Berdasarkan Isu Strategis Kabupaten Sleman seperti pelayanan birokrasi belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan masih adanya konflik dan permasalahan sosial (Bappeda DIY, 2017) .

TABEL 1.1.
Investasi PMA + PMDN di DIY

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2012	7.056.066.141.759
2	2013	8.067.770.134.638
3	2014	9.524.400.134.638
4	2015	11.223.404.242.074
5	2016	12.077.661.664.802

Sumber : BKPM DIY, 2017 (Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat pada investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pertahunnya ini, meskipun terjadi peningkatan pada jumlah PMA dan PMDN di DIY tetapi tidak menjamin nilai tersebut juga naik bila dibandingkan dengan nilai investasi di provinsi lain di pulau jawa dan bali

nilai investasi DIY masih relatif kecil. Dari data jumlah gabungan tersebut ternyata PMDN pada tahun 2016 menyumbang Rp 937 miliar itu artinya pada tahun 2016 jumlah PMA lebih sedikit dibanding PMDN. Perbandingan tersebut menunjukkan perlu adanya formulasi untuk meningkatkan investasi asing.

TABEL 1.2.
Rekapitulasi Data Potensi Industri Menengah Kecil, Besar
Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp)
1	Bantul	18.685	84.972	184.496.899.948
2	Sleman	16.771	62.077	4.944.506.345.966
3	Kulon Progo	21.018	58.169	1.086.724.608.942
4	Gunung Kidul	20.660	33.562	743.288.829.586
5	Kota Yogyakarta	4.183	22.661	5.118.664.980.360

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi DIY, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tentang potensi Industri Menengah Kecil, Besar DIY tahun 2017 belum merata meskipun nilai investasi DIY yang tumbuh positif menunjukkan DIY memiliki daya tarik investasi dan iklim usaha yang kondusif. Berdasarkan tabel diatas terlihat kabupaten DIY yang nilai investasinya terbesar pada Kabupaten Sleman padahal jumlah industrinya lebih rendah dibanding kabupaten lainnya, hal ini berarti Kabupaten Sleman cukup menarik pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut. Disamping itu Kabupaten Sleman yang memiliki letak strategis dekat dengan pusat kota sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Tentunya masih banyak potensi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa dijadikan pusat-pusat industri seperti Kulon Progo dan Gunung Kidul yang memiliki pusat pariwisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman pada sektor industri Kabupaten Sleman selalu mengalami peningkatan jumlah sektor industri dan ditandai dengan bertambahnya pelaku usaha, ini merupakan dampak positif pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Industri kecil menengah tetap berkembang meskipun telah terjadinya krisis ekonomi negara. Industri kecil menengah sebagai penyelamat bangsa karena memberikan kontribusi pada PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Badan Pusat Statistik Pertumbuhan produksi Industri Mikro Kecil (IMK) D.I. Yogyakarta triwulan I tahun 2017 terhadap triwulan I tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 10,54 persen. Kenaikan pertumbuhan produksi di D.I. Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan di tingkat nasional, yang tumbuh sebesar 6,63 persen. Maka dari itu Industri Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari hasil riset terungkap, sektor industri kecil ini menyumbang sekitar 39% pada PDRB dan menyerap 65% dari total angkatan kerja dan proporsi eksponnya rata-rata 13% (BPS, 2016). Realitas ini menunjukkan bahwa sektor industri ini merupakan sektor ekonomi yang terus menggeliat. Namun harus disadari, pertumbuhan kelompok industri ini relative sangat lambat. Hal itu karena model-model perberdayaan industri kecil masih belum cukup adaptif. Berdasarkan data tersebut industri mikro kecil sangat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetapi untuk mempertahankan

pertumbuhan tersebut tentu tidak mudah. Pemberdayaan untuk pelaku usaha industri harus terus dikembangkan melihat pada era sekarang ini persaingan bisnis cukup ketat. Para pelaku usaha industri harus terus meningkatkan kinerja, kreatifitas, inovasi dan tanggap terhadap kemajuan teknologi.

TABEL 1.3
Jumlah Industri Kecil dan Industri Besar Menengah
di Kabupaten Sleman Tahun 2012- 2016

Tahun	Indsutri Besar Menengah	Industri Kecil
2012	128	15,707
2013	135	15,841
2014	144	15,944
2015	153	16,230
2016	158	16,488

Sumber : Disperindag Sleman, 2017 (Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat kenaikan jumlah industri kecil menengah pada setiap tahunnya di Kabupaten Sleman dari tahun 2012 sampai 2016 terjadi kenaikan 781 sektor industri kecil menengah pada kurun waktu 4 tahun. Dalam pengembangan wilayah industri kecil menengah berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja sehingga memberikan peluang mengembangkan kemampuan berusaha yang tangguh dan mandiri. Industri kecil menengah berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Industri kecil menengah memberikan kontribusi yang besar dalam pemenuhan penyediaan barang dan jasa karena industri kecil menengah berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan komperatif.

Pada FGD Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Sleman yang dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor industri di Kabupaten Sleman. Mereka menyampaikan hambatannya

seperti yang disampaikan oleh Marsudi dari Asosiasi Sentra Bambu, (28 Oktober 2017) menyampaikan kendala seperti aspek pemasaran yang kurang dan proses perizinan yang mudah hanya sampai ijin kelurahan ditingkat atas proses perizinan belum mudah. Para pelaku usaha menyampaikan aspirasinya bahwa untuk potensi industri Kabupaten Sleman kedepannya perlu dukungan dari Pemerintah Daerah di berbagai aspek untuk kemudahan berusaha karena mayoritas sentra industri sleman terkendala pada sertifikasi banyaknya persyaratan untuk perizinan, maka dari itu apabila pemerintah daerah memfasilitasi akan menjadi berkurangnya hambatan pelaku usaha atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Pelaku usaha merupakan eksistensi penting dalam pengembangan industri yang akan berdampak pada kesuksesan. Adanya tambahan biaya untuk mengurus perizinan agar cepat selsai dirasa sangat mengganggu karena yang seharusnya biaya dikeluarkan untuk penambahan modal usaha.

Apabila kita lihat perkembangan Kabupaten Sleman ini sangat pesat karena lokasi Kabupaten Sleman yang merupakan kota metropolitan di Yogyakarta. Pada tahun 2017 ini banyak kehadiran gedung-gedung tinggi, banyak di bangun pusat perbelanjaan yang modern serta transportasi umum yang modern dan sarana yang lengkap berada di Sleman ini. Tentu saja banyak dilirik oleh para calon investor sebagai daerah yang mudah untuk berinvestasi. Berdasarkan Database *Doing Business* tahun 2012 untuk seluruh dari Database *Doing Business* seluruh Indonesia posisi kota dengan proses termudah untuk mendirikan usaha diduduki oleh Yogyakarta sebagai

peringkat pertama dari 20 Kota di Indonesia diikuti kota Palangkaraya, Surakarta, Semarang, Banda Aceh, Gorontalo, Balikpapan, Jakarta, Denpasar, Mataram, Palembang, Bandung, Pontianak, Surabaya, Batam, Pekanbaru, Makasar, Jambi, Medan dan terakhir Manado. Dari kondisi tersebut dapat membentuk persepsi tentang iklim usaha di Kabupaten Sleman.

Untuk membentuk persepsi tersebut peran pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menarik pelaku usaha untuk berinvestasi. Pelaku usaha dapat membantu mengembangkan atau memajukan sebuah kawasan. Pelaku usaha atau investor tentu juga mempertimbangkan adanya sebuah stabilitas politik, kepastian hukum, tersedia infrastuktur, faktor ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya merupakan faktor iklim investasi di suatu daerah. Maka dari itu pelaku usaha perlu diyakinkan bahwa daerah tersebut mempunyai iklim investasi yang sehat dan kemudahan serta prosedur penanaman modal yang jelas (Sukesi dan Ignatia MH, 2010).

Dalam kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sleman berbagai upaya dilakukan pemerintahan kabupaten sleman dalam peningkatan kualitas layanan perizinan, penyederhaan perizinan, perluasan penanaman modal. Tentu saja untuk menjadikan Sleman sebagai wilayah yang banyak dilirik oleh para investor, Infrastruktur Kabupaten Sleman juga diperbaiki seperti peningkatan kualitas jalan, jembatan, drainasi dan lain-lain. Transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam infrastruktur untuk mendukung iklim usaha yang baik karena ketersediaan infrastruktur pendukung sangat penting untuk kegiatan usaha (Lestari dan Hidayat, 2014).

Dalam iklim usaha sistem keuangan akan menciptakan kepercayaan bagi nasabah untuk menanamkan modalnya. Maka dibutuhkan lembaga keuangan yang dirasa aman, efisien dan menguntungkan untuk kondisi keuangan industri yang stabil. Ada tiga hal yang diinginkan investor dan para pelaku usaha yaitu tentang penyederhanaan sistem perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih dan transparansi biaya perizinan (Sukezi dan Ignatia MH, 2010). Dari hal tersebut juga berlaku untuk Kabupaten Sleman sebagai pusat kota ekonomi dan letak yang strategis menjadikan kota ini sebagai destinasi industri yang cukup menjanjikan. Namun adanya beberapa permasalahan yang mempengaruhi faktor-faktor iklim usaha disuatu daerah sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelaku usaha dalam menanamkan usahanya. Untuk mengetahui kondisi usaha Kabupaten Sleman melalui perspektif pelaku usaha dalam mendirikan usaha maka perlu penelitian tentang “ **Analisis Persepsi Pelaku Usaha terhadap Iklim Usaha di Kabupaten Sleman**”

B. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu membuat batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi iklim usaha di Kabupaten Sleman dari persepsi pelaku usaha dengan analisis kebijakan pemerintah, kestabilan sosial & politik, infrastruktur, sistem keuangan, dan birokrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kabupaten Sleman?
2. Faktor apa yang paling dominan sebagai penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor yang dianggap paling dominan sebagai penentu iklim usaha di Kabupaten Sleman

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi pelaku usaha diharapkan mampu menangkap peluang baik agar usaha yang telah ada dapat berkembang dan maju .
2. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sleman, di harapkan ikut berperan dalam pembentukan iklim usaha yang kondusif.

3. Bagi pihak peneliti dan akademik sebagai tambahan informasi dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang sama.